

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**WIDIYA
07011281823103**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

WIDIYA

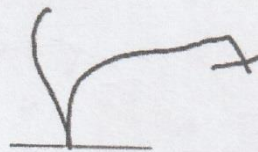
07011281823103

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002



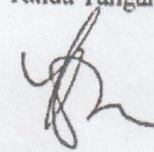
10 Agustus 2022

Pembimbing II

Tanda Tangan

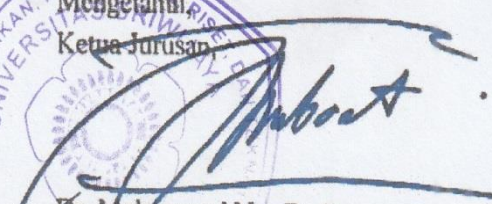
Tanggal

Dra. Tuty Khairunnisvah, M.A
NIP. 196201051988032004

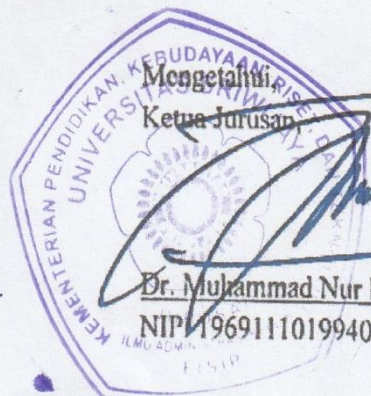


28 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**

Skripsi

Oleh :

WIDIYA
07011281823103

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 15 September 2022**

Pembimbing :

1. Drs. Gatot Budiarto, M. S
NIP. 195806091984031002
2. Dra. Tuty Khairunnisyah, M. A
NIP. 196201051988032004

Tanda Tangan

Penguji :

1. Dr. Lili Erina, M. Si
NIP. 196612301992032001
2. Sofyan Effendi, S. IP., M. Si
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfiri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q. S. Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini Saya persembahkan untuk:

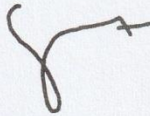
- 1. Kedua orang tua saya, Bapak Ibrahim dan Ibu Gustriani**
- 2. Ayuk saya Nurmala Dewi**
- 3. Nenek saya Nursiah dan semua anggota keluarga besar**
- 4. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya**
- 5. Teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018**
- 6. Almamater yang saya banggakan**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yaitu tidak ada pelatihan resmi SIPD yang didapatkan, pembagian tanggung jawab yang kurang berjalan dan beberapa OPD mengalami kendala teknis input dalam SIPD. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian adalah deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Perencanaan Anggaran, Pengelola data di Bidang Anggaran, Kasubbag Perencanaan Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir belum optimal karena masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dengan baik. Saran teoritis yaitu peneliti lain hendaknya lebih memahami permasalahan di lapangan agar dapat menyesuaikan indikator yang akan digunakan dengan benar. Saran praktis hendaknya meningkatkan komunikasi dengan OPD di Kab. Ogan Komering Ilir, mengadakan pelatihan atau sosialisasi SIPD, menambah sarana dan prasarana penunjang implementasi SIPD, memberikan penghargaan dan sanksi atau hukuman kepada pelaksana kebijakan SIPD dan membuat SOP SIPD.

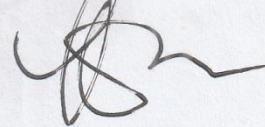
Kata kunci: Implementasi, Sistem, Informasi, Pemerintahan, Daerah, BPKAD

Pembimbing I



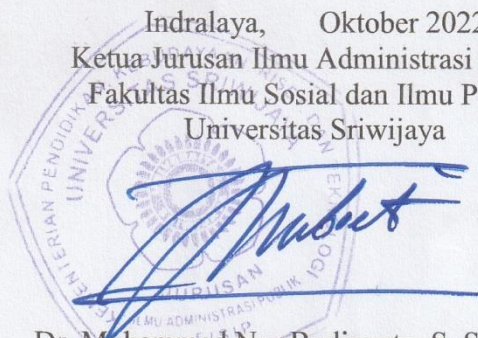
Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II



Dra. Tuty Khairunnisyah, M.A
NIP. 196201051988032004

Indralaya, Oktober 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



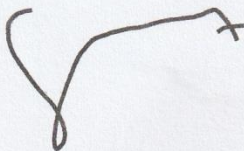
Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research was motivated by the problems that no official SIPD training was obtained, the division of responsibilities was not running well and some OPDs experienced technical problems with input into SIPD. The purpose of the study was to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Regional Financial and Asset Management Agency of Ogan Komering Ilir Regency. This type of research is descriptive using qualitative research methods. The informants in this study were the Head of Regional Budget Planning, Central and Regional Financial Analysts, Budget Planning Analysts, Data Managers in the Budget Sector, Head of Subsection for Planning for Dispora of Ogan Komering Ilir Regency, Treasurer of Kesbangpol Ogan Komering Ilir Regency, and Head of Subdivision for Planning and Reporting at the Regency Kominfo Service Ogan Komering Ilir. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation studies. This study uses George C. Edward III's theory of policy implementation which contains four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the BPKAD of Ogan Komering Ilir Regency was not optimal because there were still indicators that had not been fulfilled properly. Theoretical suggestions are that other researchers should better understand the problems in the field in order to be able to adjust the indicators that will be used correctly. Practical advice should be to improve communication with OPD in Kab. Ogan Komering Ilir, held training or socialization of SIPD, added facilities and infrastructure to support the implementation of SIPD, gave rewards and sanctions or punishments to implementers of SIPD policies and made SIPD SOPs.

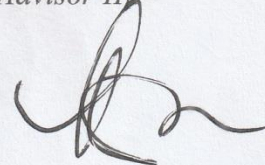
Keywords: Implementation, System, Information, Government, Region, BPKAD

Advisor I



Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

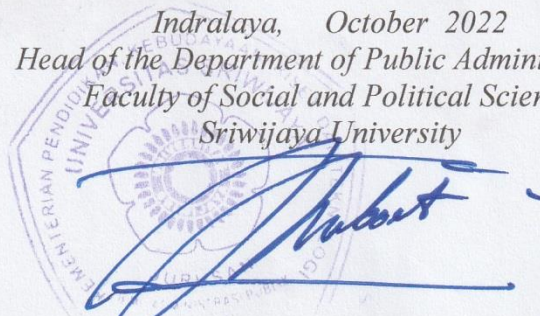
Advisor II



Dra. Tuty Khairunnisyah, M.A
NIP. 196201051988032004

Indralaya, October 2022

Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir”**. Sholawat beriring salam tak lelah terucap kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh derajat pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Kedua orang tuaku tercinta** yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Prof. Dr. Alfitri., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2022-2026.
5. **Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2018-2022.
6. **Ibu Dwi Mirani, S. IP., M. Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memperlancar dalam proses akademik penulis.
7. **Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam membantu pembuatan skripsi ini.
8. **Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam membantu pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
10. Seluruh staf dan pegawai pengajar jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
11. Seluruh pegawai dan staf **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.**
12. Seluruh pegawai dan staf **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.**
13. Seluruh pegawai dan staf **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir.**
14. Seluruh pegawai dan staf **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.**
15. Seluruh anggota keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan dari awal perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Agustus 2022
Penulis

Widiya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
PERNYATAAN ORISINALITAS	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
3. Konsep <i>Electronic Government (e-Government)</i>	15
4. Konsep Sistem Informasi Manajemen di Sektor Publik.....	15
5. Konsep Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	16
6. Teori Implementasi Kebijakan Publik	17
B. Teori Implementasi Kebijakan Publik Yang Digunakan.....	21
C. Penelitian Terdahulu.....	23
D. Kerangka Pemikiran	28
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Definisi Konsep	34
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Informan Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Sistematika Penulisan	42
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Kabupaten Ogan Komering Ilir	44
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir....	44

B. Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	51
1. Komunikasi dalam Implementasi SIPD pada BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir	51
2. Sumber Daya dalam Implementasi SIPD pada BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir.	65
3. Disposisi dalam Implementasi SIPD pada BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir..	102
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi SIPD pada BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir	110
C. Hasil Temuan.....	123
BAB V	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pembagian Tanggung Jawab Pengelola SIPD terhadap OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir	9
2. OPD di Kab. Ogan Komering Ilir yang Mengalami Kendala Teknis SIPD.....	11
3. Penelitian Terdahulu.....	24
4. Fokus Penelitian	35
5. Bentuk Penyaluran Komunikasi Implementasi SIPD	57
6. Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Implementasi SIPD	65
7. Gelar Akademik yang Dimiliki Pelaksana Kebijakan SIPD	68
8. Informasi tentang Tata Cara Melaksanakan Kebijakan SIPD yang Tersedia di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir	75
9. OPD yang Terkendala Teknis SIPD.....	89
10. Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Implementasi SIPD Tahun 2020.....	95
11. Pembagian Tanggung Jawab Pelaksana Kebijakan SIPD dalam Menangani OPD di Kab. Ogan Komering Ilir	115
12. Matriks Hasil dan Pembahasan	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Empat Pilar SDGs.....	2
2. Tampilan Website SIPD	4
3. Tampilan SIPD yang Dikelola BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir	5
4. Surat Tugas Nomor: 094/05/BPKAD.I/2020	6
5. Surat Tugas Nomor: 094/8.1/BPKAD.SB/2020.....	7
6. Surat Tugas Nomor: 800/292/BPKAD/2020.....	8
7. Model Pendekatan <i>Direct and Direct Impact on Implementation</i>	18
8. Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Proses</i>	19
9. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	20
10. Kerangka Pemikiran Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	33
11. Kantor BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir	45
12. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	50
13. Alur Komunikasi	52
14. Komunikasi Secara Langsung dengan Kemendagri.....	54
15. Komunikasi Melalui Surat dengan Kemendagri	54
16. Bentuk Komunikasi Melalui Surat kepada OPD tentang SIPD	56
17. Pegawai BPKAD Kab. OKI ke Pusdatin Kemendagri.....	60
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.....	63
19. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.....	63
20. Pendidikan Terakhir Pelaksana Kebijakan SIPD	67
21. Pegawai BPKAD Belajar Langsung SIPD ke Kemendagri.....	69
22. Surat Tugas ke Bappeda Kab. Empat Lawang	70
23. Kegiatan Belajar SIPD di Bappeda Kab. Empat Lawang	71
24. Sosialisasi SIPD yang Diadakan BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir	72
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	90
26. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 3/ KEP/BPKAD/2021.....	90
27. Wewenang Pelaksana Kebijakan SIPD di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir	91
28. Surat Permintaan Membuka Kunci pada SIPD	92
29. Lembar Disposisi dari Kepala BPKAD kepada Kabid Perencanaan Anggaran Daerah.....	93
30. Komputer dan Printer	95
31. Laptop di Ruangan Kabid Anggaran	96
32. Penghancur Kertas.....	96
33. Wifi Kantor.....	96
34. Kursi dan sofa.....	97
35. TV di Ruang Bidang Anggaran	97
36. Meja Kayu	97
37. Ruangan untuk Diskusi, Konsultasi dan Sosialisasi.....	98
38. Listrik di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir	98
39. Komputer yang Kondisinya Kurang Bagus.....	99

40. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Anggaran BPKAD Kab. OKI.....	105
41. SK Tim Pengelola SIPD	106
42. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	113
43. Alur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Izin Pengambilan Data
3. Surat Balasan dari BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir Perihal Izin Pengambilan Data
4. Surat Balasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ogan Komering Ilir Perihal Izin Pengambilan Data
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
7. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
8. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
9. Surat Permohonan Izin Penelitian
10. Surat Balasan dari BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir Perihal Permohonan Izin Penelitian
11. Surat Balasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ogan Komering Ilir Perihal Permohonan Izin Penelitian
12. Surat Balasan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Ogan Komering Ilir Perihal Permohonan Izin Penelitian
13. Pedoman Wawancara
14. Pedoman Observasi
15. Pedoman Dokumentasi
16. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
17. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
18. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif
19. Form II Ujian Komprehensif
20. Contoh Hasil SIPD berupa RKA SKPD Tahun Anggaran 2021
21. Surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk Menunjuk *Person In Charge* (PIC)
22. Foto Wawancara dengan Informan Penelitian
23. Hasil Coding
24. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 3/KEP/BPKAD/2021 tentang Penetapan Admin Keuangan, Penyelia Keuangan, Penetapan Admin Standar Satuan Harga (SSH), Penyelia Standar Satuan Harga (SSH), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Mitra Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
25. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 280/KEP/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kab.	: Kabupaten
KUA	: Kebijakan Umum APBD
OKI	: Ogan Komering Ilir
OKU	: Ogan Komering Ulu
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standar Operating Procedures</i>
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widiya

NIM : 07011281823103

Tempat dan Tanggal Lahir : Lahat, 16 Oktober 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 10 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



WIDIYA
07011281823103

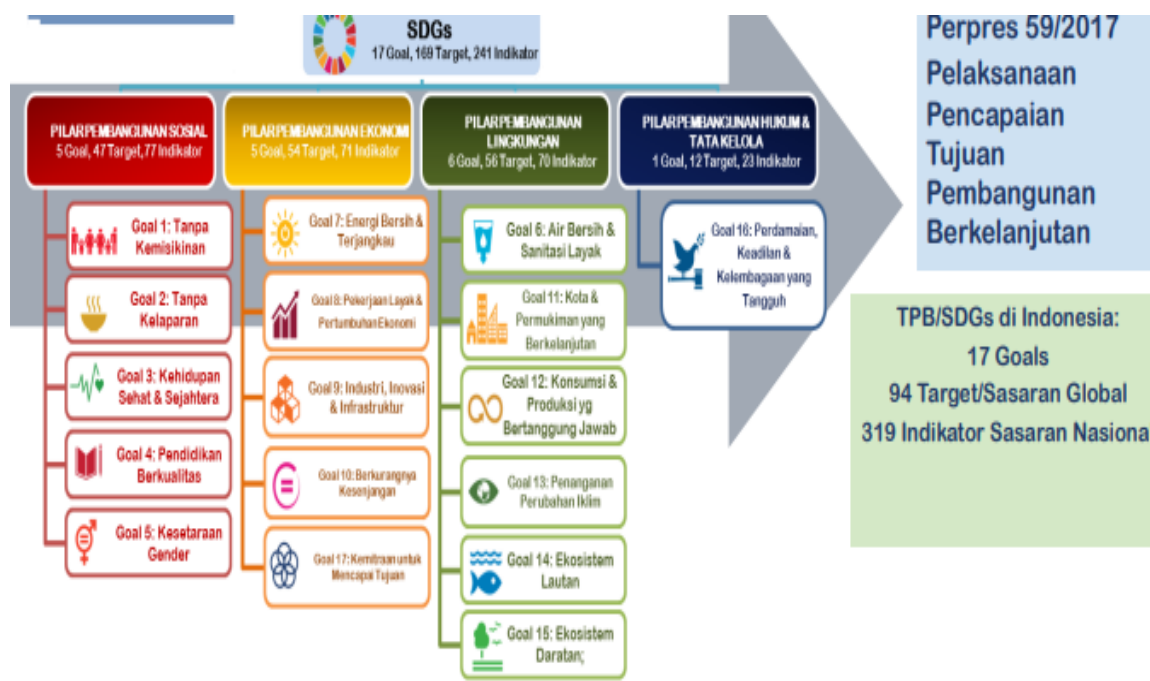
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam sidang umumnya pada September 2015 menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda pembangunan global tahun 2016 sampai tahun 2030 yang telah disepakati oleh pemimpin dunia termasuk Indonesia yang memiliki 17 tujuan dan 169 target.

Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai 17 tujuan yaitu: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuh belas tujuan dan 149 target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dikelompokkan menjadi empat pilar untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauannya yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola, seperti yang diuraikan dalam gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Empat Pilar SDGs

Sumber: SDGs Center University of Bengkulu

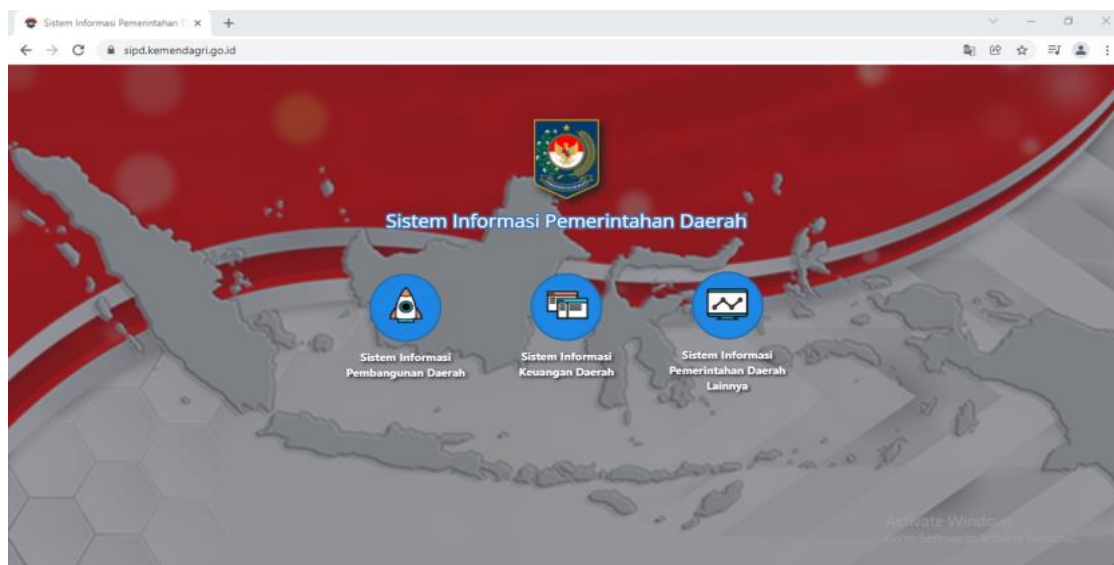
Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai tujuan SDGs yang telah disepakati tersebut. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs khususnya poin ke-16 yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menyampaikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pemeriksa, 2021).

Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 391 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi pemerintah daerah mengalami kendala dalam melaksanakan amanat tersebut. Beberapa masalah yang dialami seperti belum tersedianya *data base* yang cukup kuat sebagai dasar yang digunakan untuk analisa perencanaan, data pembangunan

daerah secara nasional sulit untuk dicari karena tidak terkompilasi serta terintegrasi antara daerah dan pusat, belum terstandarisasinya kodifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, beraneka *platform* sistem informasi yang digunakan oleh daerah sehingga menyulitkan untuk dilakukan integrasi, terpisahnya informasi perencanaan dan keuangan yang bisa memunculkan beberapa kesalahan di daerah serta proses perencanaan dan penganggaran di daerah yang belum tepat waktu (Karundeng, et al. 2021:3)

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada yaitu dengan membuat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan transparan yang penting untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. SIPD juga merupakan salah satu bentuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *electronic government (e-government)* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang merupakan upaya untuk mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan Pasal 1 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

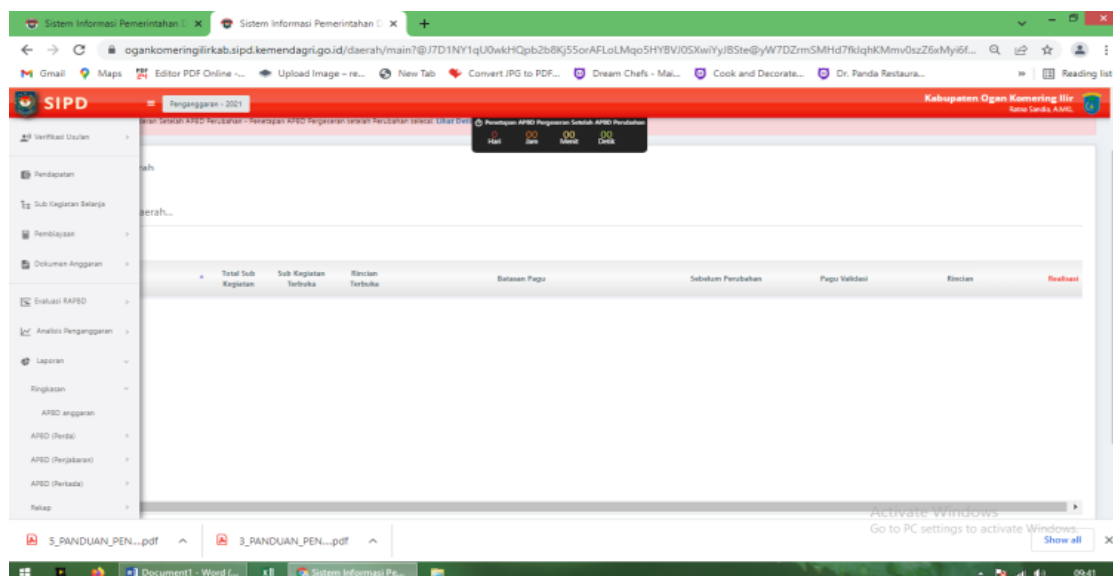


Gambar 2 Tampilan Website SIPD

Sumber : (sipd.kemendagri.go.id, tahun 2022)

Semenjak dikeluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2020, maka Pemerintah Daerah di Indonesia diharuskan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk salah satu Pemda yang telah menggunakan SIPD, khususnya untuk SIPD yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah digunakan sejak tahun 2020 yang sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



Gambar 3 Tampilan SIPD yang Dikelola BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meliputi penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, penyusunan rancangan APBD, dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikelola oleh BPKAD terbagi menjadi dua yaitu SIPD Penganggaran dan SIPD Penatausahaan.

Penelitian ini membahas mengenai SIPD Penganggaran yang dikelola pada tahun 2020 oleh Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang digunakan untuk melakukan penyusunan KUA PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan penyusunan rancangan APBD. Dokumen hasil SIPD yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti yang terlihat pada lampiran 20. Terdapat tujuh pegawai di Bidang Anggaran Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SIPD yang berkedudukan sebagai penyelia keuangan dalam SIPD dan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagai Admin Satuan

Standar Harga ditunjuk untuk menjadi *Person In Charge* (PIC) sebagai penanggung jawab untuk mempermudah koordinasi implementasi SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri (Surat dari Kemendagri tentang Permintaan penunjukkan PIC terdapat di lampiran 21).

Awal penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, implementor SIPD menemui kendala karena tidak ada pelatihan resmi tentang SIPD yang diberikan sehingga untuk belajar SIPD mereka inisiatif melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Berikut hasil wawancara dengan A. P selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang mengatakan: “Sosialisasinya itu bukan kita ikut sosialisasi langsung. Bimtek/sosialisasi SIPD seluruh kabupaten bukan, tapi kita yang ada keinginan sendiri untuk mempelajarinya. Kalau pelatihan resmi belum pernah, hanya saja sering konsultasi langsung ke Kemendagrinya.” (Wawancara pada 29 Juni 2022). Berikut foto surat tugas konsultasi tentang SIPD ke Kementerian Dalam Negeri:

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT TUGAS
 Nomor : 094/05/BPKAD.I/2020

Yang Memberi Perintah	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nama yang Berpergian	:	
Nama/NIP	:	1. Eko Santoso, SE.MM NIP.198207062006041008 2. Sri Kencanawati, SE.,MM NIP.197701272010012001 3. Sopiyantri, ST NIP. 197809022010012007 4. Ratna Sandia,A.MKL NIP. 198103212012121001
Pangkat/Gol./Jabatan	:	1. Penata Tk. I / III.d / Kabid Perencanaan Anggaran Daerah 2. Penata / III.d / Kasubbid Analisa Kebijakan Keuangan dan Pengendalian Anggaran 3. Penata Muda / III.a / Analis Perencanaan Penganggaran 4. Pengatur Tingkat I / II.d / Pengelola Data
Urusan	:	Dalam Rangka Koordinasi Tentang APBD Tahun Anggaran 2021
Tujuan Perjalanan	:	Kementerian Dalam Negeri
Alat Angkut yang Dipergunakan	:	Mobil BG 1385 KZ
Lama Perjalanan	:	1 (Satu) Hari
	:	Berangkat tanggal 16 Juli 2020
	:	Kembali tanggal 18 Juli 2020
Keterangan	:	

Dikeluarkan di : Kayuagung
 Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Kepala Badan
 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Ogan Komering Ilir

H. H. Murni, MM
 Pemimpin Utama Muda
 NIP.196502211990031008

  Jalan Letjend Yusuf Singadekane No. 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan
 Telepon. (0712) 321278 Faks (0712) 323893 Email : bpkad.oki@gmail.com

Gambar 4 Surat Tugas Nomor: 094/05/BPKAD.I/2020

Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT TUGAS
 Nomor: 094/ 8.1 /BPKAD.SB/2020

YANG MEMBERI PERINTAH	: KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NAMA YANG BERPERGIAN	:
1. NAMA / NIP	: 1. Eko Santoso, SE, MM/ 198207062006041008 2. Sri Kencanawati, SE, MM / 197701272010012001 3. Andri Priatama, SE/ 197808042012121001 4. Ratna Sandia, A.MKL/ 198103212012122001
2. PANGKAT / JABATAN	: 1. Penata Tk. I (III.d)/Kabid Perencanaan Anggaran Daerah 2. Penata Tk. I (III.d) / Kasubbid Analisa Kebijakan Keuangan & Pengendalian Anggaran 3. Penata Muda Tk. (III. b)/Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan Belanja 4. Pengatur Tk. I (II.c)/ Pengelola Data
3. URUSAN	: Mendampingi Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Permendagri 90 Tahun 2019 dan Permendagri 64 Tahun 2020.
4. TUJUAN PERJALANAN	: Kementrian Dalam Negeri
5. LAMA PERJALANAN	: 3 (Tiga) Hari Tanggal 24 Agustus s/d 26 Agustus 2020

DIKELUARKAN DI : KAYUAGUNG
 PADA TANGGAL : AGUSTUS 2020
 KEPALA BADAN PENGELOLA
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


 Ir. KURNIAWAN, MM
 PENATA MUDA, IV/c
 NIP. 196502211990031008



 Jalan Letjend Yusuf Singadekane No. 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan
 Telepon. (0712) 321278 Faks (0712) 323893 Email : bpkad.oki@gmail.com

Gambar 5 Surat Tugas Nomor: 094/8.1/BPKAD.SB/2020

Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir

Berdasarkan gambar 4 dan 5 diatas menjelaskan bahwa implementor SIPD di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir menemui Kemendagri memang bukan khusus hanya untuk belajar tentang SIPD tapi juga berkonsultasi terkait Penyusunan APBD, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 yang masih berhubungan dengan SIPD. Implementor SIPD di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir selain belajar SIPD dengan Kemendagri, juga belajar SIPD dengan Bappeda Kab. Empat Lawang agar lebih memahami SIPD. Berikut foto surat tugas saat belajar SIPD dengan Kab. Empat Lawang:



Gambar 6 Surat Tugas Nomor: 800/292/BPKAD/2020

Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir

Kendala lain yang ditemukan yaitu pembagian tugas implementor SIPD di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memberikan pelayanan publik kepada OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir kurang berjalan. Berikut hasil wawancara dengan Y. N selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang mengatakan:

“Awalnya ado misalno sub koordinat, kalo dulu kasi sebelum sekarang jadi fungsional. Bu Sri megang berapa dinas, saya megang berapa dinas, Pak Andri berapa dinas, terus yang dibawah aku dibagi. Bu Sopi berapa dinas, terus misalno siapa berapa dinas kayak gitu. Tau-tau pada pelaksanaannyo katoku tadi ado beberapa orang yang sigap ado yang kurang, jadi kadangan kito atasi. Kurang jalan, sudah akhirnya samo-samo (awalnya ada misalnya sub koordinat, kalau dahulu kasi sebelum sekarang jadi fungsional. Ibu Sri memegang berapa dinas, Saya memegang berapa dinas, Bapak Andri berapa dinas, terus yang dibawah aku dibagi. Ibu Sopi berapa dinas, terus misalnya siapa berapa dinas seperti itu. Tahu-tahu pada pelaksanaannya kataku tadi ada beberapa orang yang sigap ada yang kurang, jadi terkadang kita atasi. Kurang jalan, sudah akhirnya sama-sama).” (Wawancara pada 28 Juni 2022)

Tabel 1 Pembagian Tanggung Jawab Pengelola SIPD terhadap OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Nama Kepala Seksi yang Menjadi Penanggung Jawab	Nama Staf dan TKS yang Membantu	Nama OPD yang Menjadi Tanggung Jawab
S.K	R.S E.M J.D Y.H.S S.B	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Pengelola Pajak Daerah Kecamatan SP. Padang Kecamatan Jejawi Kecamatan Pampangan Kecamatan Tulung Selapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan Pdamaran Kecamatan Tanjung Lubuk Kecamatan Kota Kayu Agung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat
A. P	A. P A. B M N. Y M. S	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung/BLUD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Sosial Kecamatan Pdamaran Kecamatan Tanjung Lubuk Kecamatan Lempuing Kecamatan Mesuji Kecamatan Sungai Menang Kecamatan Air Sugihan Kecamatan Cengal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Lanjutan Tabel 1 Pembagian Tanggung Jawab Pengelola SIPD terhadap OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Y. N	S M. H E. A M. I	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga
------	---------------------------	--

Sumber : Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan tabel 1 diatas, terdapat 53 OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibagi menjadi tiga kelompok dan setiap kelompok terdapat dua pelaksana SIPD di BPKAD yang dibantu dengan tenaga kerja sukarela. Namun, pembagian tanggung jawab diatas kurang berjalan seperti yang terlihat dari hasil wawancara dengan Y. N selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah diatas, sehingga jika ada kendala teknis dari OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dibantu dengan pegawai yang sama tetapi dibantu oleh pegawai yang sedang ada di tempat sehingga setiap implementor SIPD di BPKAD berbeda jumlah OPD yang dilayaninya. Kendala lain yang ditemukan yaitu ada delapan OPD yang pernah mengalami kendala teknis dalam menginput ke dalam SIPD karena terkendala jaringan atau SDM sehingga perlunya memperbanyak komunikasi untuk mengingatkan agar tidak telat dalam menginput. Berikut nama OPD yang pernah mengalami kendala teknis SIPD:

Tabel 2 OPD di Kab. Ogan Komering Ilir yang Mengalami Kendala Teknis SIPD

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Kecamatan Kota Kayu Agung
6	Kecamatan Pampangan
7	Kecamatan Air Sugihan
8	Kecamatan Teluk Gelam

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir

Diimplimentasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan. Namun, pada kenyataannya implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tidaklah mudah dikarenakan aplikasi tersebut baru dan kurangnya pelatihan, pembagian tanggung jawab yang kurang berjalan dalam menangani OPD dan ada delapan OPD yang mengalami kendala teknis dalam menginput ke dalam SIPD.

Berdasarkan beberapa kendala yang telah diuraikan diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Apa Saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, yaitu pada bidang Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kualitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kumorotomo, Wahyudi, and Subando Agus Margono. 2018. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B. et al. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. America: SAGE Publications Inc.
- Napitupulu, Darmawan, et al. 2020. *E-Government Implementasi, Strategi, & Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri Tahun Akademik 2020.
- Rochaety, Eti. 2017. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siyoto, Sandu and M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS.

JURNAL

- Alfani, Dela, and Juliana Nasution. 2022. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(1): 4036–43. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2611158>.
- Balqis, Nadya. et al. 2021. "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11(1): 146–61. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577/2693>.
- Balqis, Nadya and Zuhrizal Fadhly. 2021. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Public Policy* 7(2): 117–21. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/4246>.
- Ekaputra, Nanda Dias. 2021. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk." *Otonomi* 21(1): 62–79. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/download/1606/1152&ved=2ahUKEwiaieC13Kn1AhWvSWwGHdDfAwU4ChAWegQIBxAB&usg=AOvVaw0MY6vNeh0090dbcobSa0oK>.
- Fahzura, Laudy, and Najamudin. 2022. "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi

- Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.” *Journal of Social and Policy Issues* 2(1): 7–13. <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/66>.
- Karundeng, A. B. et al. 2021. “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.” *Jurnal Governance* 1(2): 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315/33810>.
- Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani. 2021. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan.” *Jurnal Akutansi dan Keuangan* 9(2): 109–16. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577/2693>.
- Sulaiman. et al. 2021. “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Mirai Manajemen* 6(2): 70–76. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+implementasi+Sistem+Informasi+Pemerintahan+Daerah+dalam+Pengelolaan+Keuangan+Daerah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DYL93Jp3LIGoJ.
- Wilansari. et al. 2022. “Implementasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Lebak.” *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer* 2(1): 121–29. <https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik/article/view/16>.
- Wurara, Citta Nadya Celine. et al. 2020. “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kota Manado).” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2(5): 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31423>.

PERATURAN

- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 280/KEP/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 3/KEP/BPKAD/2021 tentang Penetapan Admin Keuangan, Penyelia Keuangan, Penetapan Admin Standar Satuan Harga (SSH), Penyelia Standar Satuan Harga (SSH), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Mitra Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

INTERNET

Bengkulu, Universitas. “*SDGs Center University of Bengkulu 2019.*” <https://sdgscenter.unib.ac.id/download.php> (June 5, 2022)
 Pemeriksa, Warta. 2021. “*Ini Harapan Kemendagri Soal SIPD.*” <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=25585> (June 5, 2022).
sipd.kemendagri.go.id. <https://sipd.kemendagri.go.id/> (January 2, 2022)

DOKUMEN

Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka *Ogan Komering Ilir Regency In Figures* 2021.